



# Forpi Desak Hotel Penunggak Pajak Ditutup

**YOGYA, TRIBUN** - Forpi Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera menutup hotel yang terbukti menunggak pajak. Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera.

Menurutnya, dengan adanya hotel yang masih menunggak pajak dapat mempengaruhi citra Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Termasuk juga merugikan hotel yang telah tertib membayar pajak.

"Jika tidak segera diingatkan dan ditagih, maka potensi kebocoran keuangan semakin besar, apalagi hasil pajak merupakan salah satu anggaran pendapatan daerah. Dengan demikian penunggak pajak harus segera membayar tunggakan pajaknya," katanya, Kamis (15/8).

Menurut catatan KPK, ada empat hotel yang masih menunggak pa-

jak. Kamba menilai hal Pemkot Yogyakarta masih lemah dalam melakukan pemantauan. "Ini bukti lemahnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal aktif mengingatkan para wajib pajak, sehingga hal semacam ini masih terjadi," sambungnya.

Kamba pun meminta Pemkot Yogyakarta untuk tegas jika masih ada wajib pajak yang menunggak pajak, bahkan dengan jalan menutup izin operasional hotel.

Terpisah, Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro mengatakan sebaiknya jangan langsung menutup operasional hotel. Tidak semua hotel memiliki pemastikan yang baik.

"Ada beberapa hotel yang memang tidak mendapat pemasukan yang seimbang. Uang kan harus mutar terus. Untuk membayar listrik, pegawai supaya hotel bisa beroperasi, bahkan, ya, menggunakan uang untuk mem-

bayar pajak itu," katanya.

Menurut Istidjab perlu ada komunikasi yang baik antara Pemkot Yogyakarta dan hotel yang menunggak pajak. Pemerintah Kota Yogyakarta juga harus memberikan surat peringatan kepada hotel yang menunggak, tapi pihak hotel juga harus aktif berkomunikasi dengan pemkot.

"Pemkot bisa kasih surat peringatan dulu. Pajak memang harus dibayar, tapi ada cara lain, sehingga tidak perlu menutup hotel. Hotel juga harus aktif, kalau memang tidak mampu, ya, sampaikan ke pemkot meminta keringanan, misalnya dendanya dikurangi," beber Istidjab.

"Hotel justru yang harus aktif. Jika memang kondisi keuangan sedang tidak baik, bisa saja dicecil. Sampaikan dulu ke pemkot, cari jalan keluar supaya pajak tetap bisa terbayarkan," pungkasnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4. BPKAD 5. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

